



Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017

The Strategy of The Indonesian Government to Maintain Sovereignty in The Territories Natuna Islands Region in 2009-2017

Indra Pandapotan¹⁾*, Subhilhar²⁾ & Heri Kusmanto³⁾

¹⁾ Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Maret 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019.

Abstrak

Sebagai sebuah Negara yang perairannya lebih luas dari daratan, Indonesia harus berhadapan dengan ancaman yang terjadi di perairan Indonesia. Tahun 2009, ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna diklaim oleh pemerintah Tiongkok di peta yang berisi sembilan garis imajiner. Fokus penelitian ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi di Kepulauan Natuna dan Strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan adalah Teori Kepentingan Nasional oleh Morgenthau, Teori Soft Power yang diajukan oleh Nye, dan Konsep Pertahanan dan Keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjaga kedaulatan pulau Natuna, pemerintah Indonesia menerapkan dua strategi, yaitu strategi diplomatik dan pertahanan. Di antara dua strategi ini, strategi yang cukup berhasil dalam mempertahankan kedaulatan Kepulauan Natuna adalah strategi pertahanan.

Kata Kunci: Strategi Pertahanan, Diplomati, *Minimum Essential Force*, Kepulauan Natuna

Abstract

As a country whose waters are wider than the land, Indonesia must deal with threats that occur in Indonesian waters. In 2009, the Indonesian EEZ in the Natuna Islands was unilaterally claimed by the Chinese government on a map containing nine imaginary lines. The focus of this research is the analysis of threats that occur in the Natuna Islands and the Indonesian government's strategies in maintaining the sovereignty of the Natuna Islands. This type of research is descriptive-analytical, that trying to describe various situations, conditions that exist in society that are the object of research. In this study also uses theories and concepts that can be used as a guide in conducting research. These theories are Morgenthau's National Interest Theory, Soft Power Theory put forward by Nye, and the Concept of Defense and Security. The results of this study are that in maintaining the sovereignty of the Natuna Islands, the Indonesian government applies two strategies, namely diplomatic and defense strategies. Among these two strategies, a strategy that is quite successful in maintaining the sovereignty of the Natuna Islands is a defense strategy.

Keywords: Defence Strategies, Diplomatic, *Minimum Essential Force*, Natuna Islands.

How to Cite: Pandapotan, I, Subhilhar & Kusmanto, H. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 149-156.

*Corresponding author:
E-mail: indra.p.nasution@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki 17.504 pulau, 16.056 pulau diantaranya telah diakui oleh PBB (Prasetya, 2017). Dengan banyaknya jumlah pulau ini pula, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan dan dikenal dengan sebutan Nusantara (Van der Kroef, 1951: 166). Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (BPHN, 2015). Wilayah yang luas ini didiami oleh sekitar 258,7 juta jiwa (BPS, 2017). Letak Indonesia sendiri sangat strategis dilewati oleh garis ekuator dan berada diantara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia (Putra dkk, 2017).

Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terdapat 16.056 pulau yang telah diberikan nama di seluruh Indonesia dan jumlah ini telah dilaporkan kepada PBB (BPS, 2018). Dari keseluruhan jumlah pulau tersebut, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 11 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan pulau terluar. Akibat lokasinya yang sulit untuk dijangkau, pulau-pulau terluar di Indonesia sering terabaikan sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas dan pulau-pulau ini juga tidak tersentuh oleh pembangunan pemerintah yang mengakibatkan pulau-pulau ini tertinggal (Sabarno, 2003). Kurangnya perhatian pemerintah di daerah perbatasan juga menyebabkan seringkali negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Tiongkok melanggar kedaulatan Indonesia.

Kepulauan Natuna adalah salah satu kepulauan Indonesia yang dilanggar kedaulatannya oleh Tiongkok. Kepulauan Natuna terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan berada ditengah laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna telah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1956,

setelah sebelumnya pernah menjadi bagian dari wilayah Malaysia (Tampi, 2017 : 4). Kepulauan Natuna luasnya mencakup 264.198,37 Km², dimana 2.001.30 Km² adalah daratan sementara 262.197.07 Km² adalah perairan. Kepulauan ini bukan merupakan sebuah provinsi, melainkan salah satu dari tujuh kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu kabupaten Natuna (Seta, 2010).

Lokasi kepulauan Natuna yang posisinya menjorok ke utara yang terletak di Laut Cina Selatan bagian selatan menyebabkan kepulauan Natuna menjadi salah satu pulau yang strategis setelah kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Selain menjadi jalur strategis, perairan Natuna juga menyimpan cadangan minyak bumi dan gas alam yang terbanyak di kawasan Asia Pasifik. Kekayaan perairan Natuna dibuktikan dengan adanya kandungan gas alam pada salah satu ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km disebelah utara kepulauan Natuna yang menyimpan 112.356.680 barrel total cadangan dengan volume sebesar 222 *trillion cubic feet* (TCT). Ditambah dengan cadangan minyak bumi di kepulauan Natuna yang diperkirakan mencapai 14.386.470 barrel (Purwatiningsih dan Masykur, 2012).

Kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Natuna menjadi daya tarik oleh Tiongkok, sehingga Tiongkok melakukan klaim sepihak terhadap kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam Sembilan Garis Imajiner (*Nine Dash Lines*) di Laut Cina Selatan yang dibuat oleh Tiongkok. Dalam peta yang dibuat oleh Tiongkok tersebut, wilayah Kepulauan Natuna menjadi bagian dari kekuasaan Tiongkok (Korkut dan Kang, 2017). Sembilan Garis Imajiner adalah garis pembatas (*demarcation line*) yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok sekitar tahun 1949 untuk mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan (Riegl dkk, 2014). Namun klaim Tiongkok terhadap kepulauan Natuna tidak diakui

oleh PBB. Melalui Arbitrase Internasional, Sembilan garis imajiner yang dibentuk oleh Tiongkok tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan klaim wilayah yang berada dalam Sembilan garis imajiner (PCA, 2016). Hasil dari Arbitrase Internasional ini menguatkan bahwa kepulauan Natuna bagian dari Indonesia. Didalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori Kepentingan Nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau, Teori *Soft Power* dan Konsep Keamanan.

Kepentingan Nasional menurut Morgenthau Kepentingan Nasional itu harus dicapai oleh sebuah Negara, dengan begitu Negara tersebut akan stabil baik dari segi politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Karena Kepentingan Nasional adalah kebutuhan dari Negara tersebut (Morgenthau, 1951).

Teori *Soft Power* yang dikemukakan oleh Nye lebih menekankan pada pendekatan tanpa kekerasan menurut Nye *“The soft power affects, attracts, and persuade others to believe and admit the rule, sense of value, life style and social system through the spiritual and morality requirements.”* (Lin dan Leng, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa melalui nilai – nilai kehidupan dan sistem sosial yang ada sebuah negara dapat dijadikan cara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan tanpa harus menggunakan kekerasan.

Konsep Keamanan Menurut Buzan (1991), dalam konsep keamanan terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas

negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analitik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan banyak sumber dari buku, jurnal, dan internet terutama berita online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Terhadap Kepulauan Natuna

Tahun 2010, ketika kapal patroli Indonesia melakukan penangkapan terhadap kapal milik [nelayan asal] Tiongkok karena melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan secara ilegal dan akan di proses secara legal, kapal boat [nelayan asal] Tiongkok yang dilengkapi dengan senjata berat mengarahkan tembak mesin berkaliber besar dan mengancam kapal patroli Indonesia jika tidak melepaskan tahanan Tiongkok yang telah diamankan oleh petugas Indonesia. Dan kejadian ini terjadi berulang selama tahun 2010. Kerugian yang ditanggung oleh Indonesia akibat adanya *illegal fishing* di perairan Natuna sebesar US\$ 25.000.000.000 per tahun. Natuna sendiri diperkirakan menghasilkan 500.000 ton ikan per tahunnya (Supriyanto, 2015)

Pada tahun 2012, pemerintah Tiongkok mengeluarkan passport baru yang di dalamnya berisikan gambar peta wilayah Laut Cina Selatan yang berada dalam garis putus-putus dibagian kiri atas passport tersebut (McDonald, 2012). Dengan dikeluarkannya passport yang berisikan peta wilayah Laut Cina Selatan, pemerintah Tiongkok secara tidak langsung telah mengumumkan bahwa wilayah tersebut adalah resmi bagian dari wilayah kekuasaan Tiongkok.

Pada tahun 2013, Kapal patroli Indonesia mengamankan sebuah kapal milik Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Namun kapal patroli Indonesia mendapatkan perlawanan dari kapal patroli milik Tiongkok. Indonesia diminta untuk

melepaskan tahanan kapal milik Tiongkok yang melakukan penangkapan ilegal.

Tercatat bahwa pada tahun 2017, Tiongkok melakukan impor minyak sebesar 67% dari total keperluannya. Sedangkan untuk gas alam, Tiongkok harus mengimpor sebesar 34% dari total yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Tahun 2017, 80% dari impor minyak Tiongkok dan juga 13% impor gas alam Tiongkok transit di selat Malaka dan Laut Cina Selatan (Departemen Pertahanan AS, 2018: 54). Tampak jelas kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri.

Strategi Pemerintah Indonesia melalui Diplomatik

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada tahun 2009, Indonesia mendapatkan sebuah kabar yang datang dari pemerintah Tiongkok. Dimana pada saat itu, Tiongkok menyerahkan sebuah peta yang didalamnya berisikan Sembilan garis imajiner yang merupakan sebuah penanda wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Tiongkok. Garis imajiner yang dibuat oleh Tiongkok sebenarnya telah lama ada, namun pada saat pertama diumumkan ke dunia internasional, garis tersebut berjumlah 11 garis putus-putus. Setelah itu, sebelas garis imajiner tersebut berubah menjadi Sembilan garis imajiner. Ketika pemerintah Tiongkok memberikan peta tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengejutkan adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di perairan Natuna menjadi bagian dari klaim sepihak pemerintah Tiongkok. Berlandaskan pada konstitusi Indonesia bahwa tujuan dari Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa itu adalah strategi diplomatik. Sebagaimana Morgenthau (1951) ungkapkan "*The national interest is the ability of the state minimum to protect, and defend the physical identity, politics, and culture of the interference of other countries. From this review the country's leaders to lower specific policies*

on other countries that are cooperation or conflict". Kepulauan Natuna adalah kepentingan Indonesia, maka dari itu, sebagaimana ungkapan Morgenthau bahwa Negara melindungi dan mengamankan budaya, identitas dan juga politiknya dari Negara lain. Strategi yang dilakukan Indonesia adalah Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia, Presiden SBY memiliki orientasi *outward* atau keluar. Hal ini diperlihatkan melalui visi banyak teman, dan tidak ada musuh atau lebih dikenal dengan *thousand friends, zero enemy*. Dengan visi tersebut Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik serta kerjasama dengan negara-negara lainnya. Lalu, pada saat pemerintah Tiongkok melakukan klaim secara sepihak terhadap Natuna, tanggapan Indonesia demi mempertahankan kedaulatan Indonesia adalah melakukan dialog kepada pihak Tiongkok. Indonesia telah melakukan protes keras terhadap 9 garis imajiner milik Tiongkok melalui Komisi Landas Kontinen PBB (Ratnawati, 2015).

Tahun 2010, Indonesia juga melakukan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum dari klaim wilayah di peta tersebut, Indonesia juga menolak mengakui wilayah *nine-dash line* Tiongkok ini (Wiranto, 2016). Protes yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha menjaga integritas wilayah Indonesia tanpa harus merusak hubungan dengan Tiongkok. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melayangkan sebuah catatan verbal kepada PBB yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan teritorial antara Indonesia dengan Tiongkok mengenai Natuna dan melakukan protes terhadap 9 garis imajiner yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok (Patunru dkk, 2018).

Tahun 2012 Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam mengatasi *illegal fishing* di Natuna. Kerjasama ini terjadi di Nusa Dua Bali. Isi daripada kerjasama diantara kedua Negara tersebut adalah panduan terhadap nelayan-nelayan yang tersesat di wilayah Indonesia dan

Malaysia serta penanganannya (Widodo, 2017). Selain menteri Natalegawa, Asisten Kepala Deputy Menteri Keamanan bagian doktrin strategi pertahanan, Fahru Zaini mengumumkan perairan Natuna menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Indonesia (AntaraneWS, 2014). Jendral Moeldoko juga menuliskan pernyataan di *The Wall Street Journal* yang mempertegas bahwa militer Indonesia akan meningkatkan pengamanannya di kepulauan Natuna yang ingin diambil alih oleh Beijing (Moeldoko, 2014). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatan Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi, selain itu Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sejalan dengan memenuhi kepentingan nasionalnya tanpa menimbulkan permasalahan atau lebih tepatnya meredam konflik. Jika pada masa pemerintahan SBY lebih menekankan pada prinsip yang lebih mengedepankan hubungan dengan negara-negara lainnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih menekankan pada prinsip kedalam (*inward*). Selain itu juga pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia lebih bersikap konfrontatif. Jika pada masa pemerintahan SBY untuk memenuhi kepentingan nasional, pemerintah lebih mengedepankan cara perdamaian dan menjadi sebuah Negara yang baik, pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah lebih konfrontatif dan tidak takut jika harus melepas label negara yang baik.

Dimasa pemerintahan Jokowi, Indonesia lebih konfrontatif dibandingkan pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan berupa peraturan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015 Nomor: KEP/1255/M/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Republik Indonesia bahwa Natuna menjadi prioritas didalam pembangunan sarana dan prasarana

pengamanan pulau-pulau terkecil terluar/terdepan (KEMENHAN RI, 2015).

Pada tahun 2016, Menteri Pertanian Malaysia mengunjungi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pertemuan tersebut, Malaysia dan Indonesia membahas rencana patroli bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Adanya kerjasama ini ditujukan untuk meminimalisir pencurian ikan secara *illegal* dikedua Negara. Berlandaskan nota kesepakatan yang terjadi pada tahun 2012, Indonesia dan Malaysia melanjutkan kerjasama di wilayah perbatasan. Terkhusus diwilayah Natuna (Lerian, 2017). Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia untuk menangani *illegal fishing* adalah sebuah contoh *soft power* sebagaimana yang dikatakan oleh Nye. Nye berpendapat "*soft power is the ability of the cultural recognition and guide others to follow, and this powers stems from the attractiveness of the culture and sense of value of a nation*" (Lin dan Leng, 2017). Selain itu, Nye juga berpendapat "*The soft power affects, attracts, and persuade others to believe and admit the rule, sense of value, life style and social system through the spiritual and morality requirements.*" Dengan demikian menurut Nye, *Soft Power* adalah sebuah kemampuan yang mempengaruhi lainnya agar mengikuti, percaya dan mengakui peraturan, nilai - nilai yang dibutuhkan.

Kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 Kementerian Koordinator Kemaritiman melakukan perubahan nama pada laut Natuna. Perubahan nama tersebut diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB. Sehingga laut Natuna berubah nama menjadi Laut Utara Natuna. Adanya perubahan nama Laut Natuna tersebut merupakan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan terhadap Natuna sehingga pemerintah Indonesia dapat mengatur dan merubah nama wilayah kekuasaannya. Selain itu juga tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan merubah nama Laut Natuna menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu melawan ancaman dan kecaman dari

Tiongkok yang merupakan sebuah negara besar dengan kemampuan militer yang lebih besar dan modern.

Strategi Pemerintah Indonesia melalui Militer

Strategi pertahanan paling dasar sebuah negara adalah penangkalan. Adanya penangkalan menghambat terjadinya perang. Perang terjadi akibat kegagalan usaha pertahanan negara dan juga kegagalan diplomasi untuk mencegahnya (Departemen Pertahanan Indonesia, 2017). Strategi penangkalan yang Indonesia gunakan adalah penangkalan dengan cara pembalasan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan juga alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia tertinggal baik dari segi ekonomi maupun militer dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia (Rosdiana, 2018). Tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945, maka dalam pemenuhannya Indonesia berusaha mencegah peperangan melalui efek tangkal yang ampuh dengan meningkatkan sektor militer, hal tersebut juga sesuai dengan yang tercantum didalam konstitusi yaitu pertahanan dan keamanan Indonesia diemban oleh TNI.

Pada masa pemerintahan SBY mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menambah alutsista yang dimiliki Indonesia secara bertahap. Kebijakan ini disebut dengan *Minimum Essential Force* (MEF). MEF adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI demi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI menghadapi ancaman-ancaman (Perpres No. 41 Tahun 2010). Kebijakan ini merupakan sebuah reformasi atas kebijakan pertahanan yang sudah ada dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (KEMHAN RI, 2012).

Dimasa ini pemerintah Indonesia tidak terlalu terfokus pada Natuna, namun

pemerintah Indonesia berfokus pada perbaikan dan peningkatan militer Indonesia. Dengan adanya tambahan alutsista maka Indonesia dapat setara atau bahkan dapat mengungguli negara-negara ASEAN seperti Thailand, Filipina serta Malaysia. Adanya kebijakan MEF yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia diharapkan akan menjadi strategi pertahanan yang ampuh. Sehingga kedaulatan Indonesia tidak berulang dilanggar oleh Negara-Negara lain. Karena adanya pelanggaran berulang oleh Negara lain menunjukkan bahwa Negara lain tidak memiliki rasa hormat kepada Indonesia.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, MEF tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pada masa Jokowi, MEF telah memasuki tahap kedua (Renstra II). Adanya keseriusan pemerintah didalam menjaga kedaulatan Indonesia, tampak dari pembangunan di kepulauan Natuna. Cikal Bakal [Implementasi kebijakan] MEF mulai [lebih serius] tampak pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kondisi daratan Natuna saat ini sudah tersedia 1 brigade kombatan gabungan yang terdiri dari 1 batalyon raider, 1 batalyon arhanud, 1 skuadron Penerbad, 1 batalyon marinir dan 1 batalyon paskhas serta sejumlah alutsista seperti Oerlikon Skyshield, Pantsir-S1, AH-64E Apache, Mi-35P, MLRS Astross II, UAV dan seterusnya (Aisyah, 2017). Selain itu TNI Terpadu di Natuna akan dijadikan Mako Batalyon Komposit. Batalyon ini memiliki kekuatan 1 Kompi yang merupakan ex Kompi C 138/TS yang terletak di Desa Sepempang. Pangkalan militer ini akan ditempatkan pula Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit integratif, dibangun hangar pesawat dan heli integratif, rumah sakit integratif. Dari segi kekuatan udara, pangkalan ini terdapat hanggar skuadron *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), satrudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan taxiway, bunkers 5 pesawat tempur, satbak hanud (Ziyadi, 2016)

Pembangunan pangkalan militer yang sedang berlangsung di Natuna juga disertai dengan pengembangan *radar monitoring* dan dermaga di beberapa desa di Natuna (Ziyadi,

2016). Dengan adanya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia, maka negara-negara tetangga tidak akan dengan mudah melanggar kedaulatan Indonesia terus menerus dikarenakan telah diperkuatnya militer Indonesia yang digunakan sebagai penangkal agresi dari Negara lain. Pada tahun pada tahun 2015, presiden Joko Widodo mengunjungi pangkalan militer Indonesia yang berada di kepulauan Natuna. Pada saat itu, presiden Jokowi juga menyaksikan latihan udara "Angkasa Yudha". Selain menyaksikan latihan udara, presiden Jokowi juga melakukan peninjauan peralatan tempur milik TNI (VOA, 2015).

Angkatan Darat, Laut dan Udara Indonesia juga telah menyusun rencana demi mempertahankan dan memperkuat pertahanan di Natuna. Terdapat tambahan sekitar satu batalyon untuk memperkuat pangkalan laut Natuna. Angkatan darat akan mengirimkan 800 prajurit di Natuna sehingga jumlah prajurit yang akan ada di Natuna sekitar 2000 prajurit. Dan Angkatan Laut juga akan mengerahkan bantuan pesawat tempur di Natuna (Saragih, 2018).

SIMPULAN

Permulaan perseteruan antara Indonesia dengan Tiongkok dimulai ketika Tiongkok memberikan sebuah peta wilayah kekuasaannya yang didalamnya berisi kepulauan Natuna. Perseteruan tersebut semakin memanas disebabkan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kedaulatan Indonesia. Selain Tiongkok, kedaulatan Indonesia juga dilanggar oleh Negara lain seperti Thailand, dan Malaysia.

Didalam mempertahankan kedaulatannya, pemerintah Indonesia menjalankan dua strategi yaitu strategi diplomasi dan pertahanan. Strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan cara memanggil duta besar Tiongkok untuk Indonesia, kemudian melakukan protes melalui PBB terhadap Tiongkok serta menegaskan kepemilikan

Indonesia terhadap Natuna melalui tulisan di media internasional. Sedangkan strategi pertahanan dilakukan dengan cara menambah jumlah alutsista Indonesia, membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna serta mengirimkan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara ke pangkalan militer tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews, (2014). *China includes part of Natuna waters in its map*. Diunduh di: <https://en.antaranews.com/news/93178/china-includes-part-of-natuna-waters-in-its-map> (Accessed 22 January 2019)
- Badan Pusat Statistik (2017) *Statistik Indonesia 2017* Jakarta: CV. Dharmaputra
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2018) *Statistik Indonesia tahun 2018* Jakarta: BPS Republik Indonesia.
- Bentley, S. (2013) *Mapping the nine-dash line: recent incidents involving Indonesia in the South China Sea*. Diunduh di: <https://www.aspistrategist.org.au/mapping-the-nine-dash-line-recent-incident-involving-indonesia-in-the-south-china-sea/> (Accessed 12 January 2019)
- BPHN (2015) *Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang Terbesar Di Dunia*. Diunduh di: <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA> (Accessed 5 Mei 2018)
- Buzan, B. (1997). "Rethinking Security After the Cold War". *Corporation & Conflict, Sage Publication*. Vol, 32 No.1
- Buzan, B. Ole Wæver dan Jaap de Wilde (1998) *Security A New Framework for Analysis* Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc
- Department of defence (2017) *Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving People's Republic of China 2017*. Diunduh di: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF (Accessed 25 January 2019)
- Department of defence (2018) "Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving People's Republic of China 2018". Diunduh di: <https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF> (Accessed 27 January 2019)
- Korkut, E. dan Woo Hyun Kang (2017) "China 's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the

- Permanent Court of Arbitration". Penn State Journal of Law & International Affairs. 5(2)
- Lerian, N.P. (2017) "Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2016 (Studi Kasus: Perairan Natuna)". JOM FISIP. 4(2)
- Lin, L dan Leng Hongtao (2017) "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education". Humanities and Social Science. 5(2)
- McDonald, M. (2012) *A New Map in Chinese Passports stirs Anger Across the Region*. Diunduh di: <https://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/11/25/a-map-in-chinas-new-passports-stirs-anger/> (Accessed on 12 January 2019)
- Ministry of Defence Republik Indonesia (2015) "Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016" Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta
- Moeldoko. (2014) *China's Dismaying New Claims in the South China Sea*. Diunduh di: <https://www.wsj.com/articles/moeldoko-chinas-dismaying-new-claims-in-the-south-china-sea-1398382003> (Accessed 22 January 2019)
- Morgenthau, H.J. (1951) *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy* terj. New York: University Press of America
- Patunru, A, Mari Pangestu, and M. Chatib Basri. (2018). *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism, and Sovereignty*. Singapura: ISEAS Publishing
- Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- Permanent Court of Arbitration (2016). *The South China Sea Arbitration (The Republic Of The Philippines V. The People's Republic Of China)*. Tersedia di : <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf> (Diakses 28 Juni 2018)
- Prasetya, E. (2017) *Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB*. Diunduh di: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html> (Accessed 15 Mei 2018)
- Purwatiningsih, A. dan Masykur (2012) "Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepulauan Natuna". Jurnal Reformasi. 2(2)
- Putra, T, Tri Cahyo Utomo, and Reni Widiani (2013) "Strategi Indonesia Dalam Kepemimpinan Asean 2011 (Analisis Peranan Indonesia Sebagai Penengah Konflik Thailand-Kamboja 2008-2011)" Jurnal Ilmu Pemerintahan 2(2)
- Ratnawati, (2015). "Respon Indonesia Terhadap Klaim Cina Atas Wilayah Kepulauan Natuna Kabupaten Kepulauan Riau". Jurnal Paradigma. 19(2)
- Riegl, M, Jakub Landovski, dan Irina Valko (2014) *Strategic Region in 21st Century Power Politics: Zones of Consensus and Zones of Conflict*. Newacastle: Cambridge Scholars Publishing
- Rosdiana, H. (2018) "The Analysis of Indonesia's Strategic Culture in The North Natuna Sea Issue". Scientific Research Journal. VI(V)
- Sabarno, H. (2003) *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates
- Saragih, H.M. (2018) "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan". Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. VIII(1)
- Seta, W.J. (2010). *Atlas Lengkap Provinsi Republik Indonesia (Untuk SD, SMP, SMA dan Umum)* (Jakarta: PT Wahyu Media)
- Supriyanto, RA. (2015). "Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea?" Singapura: RSIS Comentary
- Tampi, B. (2017). "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23 No. 10
- Van der Kroef (1951) "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". *Journal of the American Oriental Society*. 71(3)
- VOA Indonesia (2015) *Presiden Jokowi Saksikan Latihan Militer TNI - AU di Natuna*. Diunduh di: <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-saksikan-latihan-udara-di-natuna-3540079.html> (Accessed 17 January 2019)
- Widodo. (2017) "Implementasi Mou Common Guidelines Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Selat Malaka". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. 7(2)
- Wiranto, S. (2016) "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Cakrawala. Edition 431
- Ziyadi, A. (2016) *Rincian Alutsista Pangkalan TNI di pulau Natuna*. Diunduh di: <http://militermeter.com/rincian-alutsista-pangkalan-tni-di-pulau-natuna/> (Accessed 22 January 2019).